

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15.A TAHUN 2012
TANGGAL : 12 - 4 - 2012

INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011-2016

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

MISI I : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	AWAL RPJMD	TARGET					AKHIR RPJMD	RUMUS PENGHITUNGAN	SKPD
				2011	2012	2013	2014	2015			
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang profesional	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	1 Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	2,64	3,31	5,84	6,17	6,73	6,06	5,29	Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dibanding jumlah seluruh Seluruh Aparatur	BKD
		2 PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/th/jenis diklat (%)	228	353	426	455	385	385	345	Jumlah PNS mengikuti diklat	BKD
		3 Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (%)	1,2	1,41	1,94	2,51	3,12	3,67	4,15	Jumlah Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu dibanding Jumlah Aparatur yang seharusnya memperoleh pembinaan dan pengembangan tepat waktu x 100%	BKD
		4 Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	82	106	130	154	178	202	226	Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Pacitan	KANTOR PERPUSTAKAAN
	2. Tercapainya SPM daerah	1 SPM yang diterapkan (%)	13	13	13	13	13	13	13	Jumlah SPM yang diterapkan dikabupaten pacitan	SETDA / ORG
		2 SKPD yang mencapai target SPM %	6,6	13	33	47	100	100	100	Jumlah SKPD yang mencapai target SPM dibanding Jumlah seluruh SKPD yang menerapkan SPM x 100%	SETDA / ORG
	3. Terselenggaranya Pelayanan Prima	1 SKPD yang menerapkan SOP (%)	64,5	65	71	100	100	100	100	Jumlah SKPD yang Menerapkan SOP dibandingkan Jumlah Seluruh SKPD x 100%	SETDA / ORG
		2 Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	Jmlh Pengaduan yg ditindak lanjuti dibandingkan jmlh pengaduan yang ada x 100%	INSPEKTORAT
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	ada/baik	ada/baik	ada/baik	ada/baik	ada/baik	ada/baik	ada/baik	Ada/Baik	SETDA / ORG
		4 Jumlah pelayanan berstandar internasional (ISO)	2	5	6	6	7	7	7	Jumlah SKPD yang berISO sampai tahun n	SETDA / ORG
		5 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,67	0,71	0,74	0,78	0,82	0,85	0,86	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP dibandingkan Jumlah penduduk usia	DINAS DUKCAPIL

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		AWAL RPJMD	TARGET					AKHIR RPJMD	RUMUS PENGHITUNGAN	SKPD		
							2011	2012	2013	2014	2015					
				6	Bayi berakte kelahiran(%)	95	97	99	100	100	100	100	Jumlah Bayi yang Berakte dibanding Seluruh Bayi x 100%	DINAS DUKCAPIL		
				7	Pasangan berakte nikah(%)	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pasangan Nikah yang Berakte dibanding Seluruh Pasangan Nikah x 100%	DINAS DUKCAPIL		
				8	Kepemilikan KTP (%)	67,72	71,1	74,65	78,38	82,29	85	86,4	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP dibandingkan Jumlah Penduduk Wajib KTP > 17 dan atau sudah menikah/pernah menikah x 100%	DINAS DUKCAPIL		
				9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	60,72	64,79	71,46	75,8	78,88	81,3	83,5	Jumlah Pnddk yang berakte dibandingkan jmlh Penduduk x 100%	DINAS DUKCAPIL		
				10	Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	83,88	85,88	87,23	90,11	92,56	95,56	96,5	Jumlah KK yang memiliki Kartu Keluarga dibandingkan Jumlah Seluruh KK x 100%	DINAS DUKCAPIL		
				11	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah/Belum	DINAS DUKCAPIL	
2.	Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	1	Pelanggaran disiplin PNS (%)	0,0022	0,0014	0,001	0,0012	0,0015	0,0015	0,0015	Jumlah PNS yang melanggar Disiplin dibanding Jumlah seluruh PNS x 100%	BKD		
				2	Jumlah SKPD yang menerapkan e-govermen	18	18	20	22	24	26	28	Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government	SETDA / PDE		
				3	Opini audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP/WTP	DPPKA		
				4	Peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders %	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders dibanding Jumlah seluruh peraturan Daerah	SETDA / HUKUM		
				5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada/Tidak	BAPPEDA & PM	
				6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada/Tidak	BAPPEDA & PM	
				7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada/Tidak	BAPPEDA & PM
				8	Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah program RKPD Tahun berkenan dibanding Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenan x100%	BAPPEDA & PM	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	AWAL RPJMD	TARGET					AKHIR RPJMD	RUMUS PENGHITUNGAN	SKPD
				2011	2012	2013	2014	2015			
		10 Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)	69,88	75,9	82	88	94	100	100	Jumlah desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman dibanding Jumlah seluruh desa	BAPEMAS & PEMDES
		11 Aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa (%)	0	71,69	73,49	75,3	77,11	78,92	80,72	Jumlah aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa dibanding Seluruh jumlah aparatur desax100%	BAPEMAS & PEMDES
		12 Desa dengan administrasi baik (%)	69,88	71,69	73,49	75,3	77,11	78,92	80,72	Jumlah desa yang beradministrasi baik di banding jumlah seluruh desa x 100%	BAPEMAS & PEMDES
		13 Jumlah SKPD dan Desa Pengelolaan arsip secara baku	69	81	95	108	121	135	148	Jumlah SKPD dan Desa yang melaksanakan Pengelolaan secara Baku	KANTOR PERPUSTAKAAN
		14 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9:1.000	9:1.000	10:1.000	11:1.000	12:1.000	13:1.000	14:1.000	Jumlah warnet yang ada dibanding Jumlah penduduk x1000	DINAS HUBKOMINFO
		15 Jumlah surat kabar nasional/lokal	3	3	3	4	4	4	5	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang ada di Kabupaten Pacitan	DINAS HUBKOMINFO
		16 Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	6	8	10	12	14	16	Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal yang ada di Kabupaten Pacitan	DINAS HUBKOMINFO
		17 Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada/Tidak	SETDA / PDE
		18 Lama proses perijinan	5,48	5,42	5,25	5,24	5,23	5,23	5,24	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	KPP